

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK DAN PERKEMBANGAN PROYEK *TWO COUNTRIES TWIN PARKS*

2.1 Dinamika Hubungan Indonesia – Tiongkok

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok telah terjalin selama 75 tahun lamanya (Kementerian Luar Negeri, 2025). Interaksi antara kedua negara bermula sejak abad ke-15, ditandai dengan masuknya para saudagar asal Tiongkok ke Indonesia berniaga ke kerajaan di pulau-pulau Indonesia yang menjadi cikal bakal terbentuknya hubungan awal yang bersifat ekonomi dan kultural. Interaksi ini berkembang secara dinamis, dan seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut semakin meluas ke ranah politik, sosial, dan diplomatik. Pasca kemerdekaan Indonesia, hubungan keduanya semakin erat. Tepat pada tahun 1950, Indonesia termasuk di antara negara-negara pertama yang secara resmi memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Tiongkok sebagai entitas yang berdaulat serta berlegitimasi penuh (Otele et al., 2022). Hal inilah yang membuka jalan bagi terjalinnya berbagai kerja sama ekonomi antara keduanya.

Pada tahun 1953, Indonesia mendelegasikan seorang Duta Besar ke Tiongkok yaitu Arnold Mononutu. Pendelegasian Duta Besar tersebut menjadi penanda bahwa hubungan antara kedua negara telah terjalin secara resmi. Pasca Mononutu didelegasikan, dilakukan penandatanganan nota kerja sama antara Indonesia-Tiongkok (Rusydati, 2014). Selain faktor historis antara kedua negara, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan

Tiongkok dilandasi oleh besarnya prospek ekonomi. Tiongkok telah menjadi sekutu bisnis paling besar bagi Indonesia di mana pada tahun 2020 tingkat perdagangan telah mencapai nominal US\$ 79,4 miliar, selain itu investasi Tiongkok pada Indonesia ditahun yang sama sebesar US\$ 4,8 miliar (Rafianda et al., 2024).

Namun seperti hubungan antar negara pada umumnya yang tidak selalu berjalan mulus, dalam perjalanannya hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok bersifat fluktuatif. Dinamika politik internasional, perbedaan kepentingan nasional, serta perubahan kepemimpinan di masing-masing negara kerap memengaruhi arah serta mewarnai hubungan bilateral antara keduanya. Salah satunya adalah fenomena pembekuan hubungan diplomatik yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok. Pada tahun 1967, hubungan antara kedua negara terhenti ketika Tiongkok menutup kedutaannya di Jakarta pada 23 Oktober 1967 yang dibalas oleh Indonesia dengan memutuskan untuk menutup Kedutaan Tiongkok di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1967. Pembekuan ini sebagian besar merupakan hasil dari ketidaksepakatan politik yang mendalam, termasuk isu-isu kontroversial seperti ideologi komunis dan status rakyat Tionghoa, yang telah menjadi titik ketegangan antara kedua negara selama bertahun-tahun (Muas, 2012). Pembekuan hubungan diplomatik tersebut menyebabkan proses negosiasi di masa-masa berikutnya menjadi lebih rumit. Meski demikian, sejumlah perkembangan pada dekade 1980-an mulai memberikan sinyal positif terhadap pemulihan hubungan, yang pada akhirnya membuka jalan bagi normalisasi hubungan antara Indonesia dan

Tiongkok (Muas, 2012). Pasca normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1990, jalinan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok mengalami perkembangan secara signifikan juga stabil, khususnya selama kurun waktu dua dekade terakhir. Kedua negara secara konsisten memperluas ruang kerja sama yang menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan non-intervensi (Sukma, 2009).

Penandatanganan Kemitraan Strategis pada tahun 2005 yang berjalan hingga tahun 2013 menandai fase baru yang lebih intensif dalam hubungan bilateral (Setneg, 2013). Kemitraan ini menunjukkan adanya kepercayaan politik yang meningkat, keterbukaan terhadap dialog strategis, serta tekad untuk memperluas kerja sama lintas sektor.

Pasca berbagai dinamika antara kedua negara, baik Indonesia maupun Tiongkok Berupaya mempertahankan hubungan baik dengan memperluas berbagai kerja sama seperti pada sektor ekonomi dan infrastruktur serta sektor keamanan dan pertahanan.

Jika diperhatikan, Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok telah menunjukkan kedekatan yang istimewa sekaligus konsisten sejak lama, tercermin dari pilihan kedua Presiden Indonesia yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang menjadikan Tiongkok sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertama mereka setelah terpilih dan dilantik. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok pada November 2014, menghadiri KTT APEC di Beijing, yang menandai komitmen awal pemerintahannya untuk mempererat kerja sama dengan

Tiongkok, terutama dalam bidang investasi dan infrastruktur (Tiongkok Radio Internasional, 2022).

Langkah ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang pada November 2024 melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke luar negeri, yaitu Tiongkok untuk memenuhi undangan dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Di Great Hall of People, Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping kemudian terlibat dalam diskusi formal di ruang pertemuan bilateral. Kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok di berbagai sektor diharapkan semakin solid melalui pertemuan ini, yang akan memberikan keuntungan bagi kedua negara (Kementerian Luar Negeri, 2024).

Tiongkok sendiri melihat Indonesia sebagai salah satu negara mitra paling strategis di kawasan ASEAN, baik secara geografis maupun ekonomi. Menurut Zuliyani et al. (2024), kerja sama dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) dapat menciptakan hubungan interdependensi, di mana proyek-proyek investasi dari Tiongkok dipandang mampu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, proyek *Two Countries Twin Parks* tidak hanya mencerminkan ekspansi ekonomi Tiongkok, tetapi juga menjadi saluran distribusi modal dan teknologi yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan industri strategis.

Prioritas kerja sama teknologi maju ini dapat dilihat dari temuan Wardana dan Putranti (2021), di mana Tiongkok secara aktif memosisikan Indonesia sebagai bagian penting dari kepentingan geostrategisnya di Asia Tenggara dan

menjadikan investasi sebagai instrumen diplomasi, termasuk dalam sektor teknologi dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Tiongkok tidak semata relasi ekonomi konvensional, melainkan sarana membangun interdependensi berbasis penguatan kapasitas nasional.

2.2 Kerja Sama yang Pernah Terjalin antara Indonesia-Tiongkok

2.2.1 Kerja Sama Ekonomi dan Infrastruktur

Pada sektor ekonomi, Tiongkok secara konsisten berperan sebagai mitra dagang strategis sekaligus signifikan untuk Indonesia. Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Posisi puncak negara tujuan ekspor non-migas Indonesia kini ditempati oleh Tiongkok. Saat 2022 lalu, ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok senilai 3,51 miliar USD (GoodStats, 2022).

Di samping itu, Tiongkok juga turut mendominasi *foreign investment* yang terdapat di Indonesia, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur, energi, dan kawasan industri dengan volume perdagangan kedua negara senilai 127 miliar USD serta investasi yang diterima Indonesia dari Tiongkok senilai lebih dari 7,4 miliar USD (Tempo, 2024).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok menunjukkan dinamika yang sangat intensif pada berbagai sektor. Lawatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok menghasilkan pernyataan bersama mengenai pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif

antara kedua negara, yang menjadi tonggak penting dalam memperdalam hubungan bilateral. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Tiongkok menandatangani enam dokumen kerja sama yang mencakup sejumlah bidang strategis (Putri & Ma'arif, 2019).

Dokumen-dokumen tersebut meliputi nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama ekonomi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok; kerja sama pengembangan industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan pihak Tiongkok; serta kerja sama pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC). Selain itu, turut disepakati kerja sama antara BASARNAS dengan Kementerian Perhubungan Tiongkok; perjanjian penghindaran pajak berganda; serta MoU antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan Antariksa Nasional Tiongkok. Rangkaian kesepakatan tersebut menunjukkan semakin luas dan terkoordinasinya kerja sama Indonesia–Tiongkok (Putri & Ma'arif, 2019).

Tiongkok tidak hanya mendorong kerja sama ekonomi dalam konteks bilateral, tetapi juga mempromosikan model pembangunan alternatif melalui inisiatif *Belt and Road* yang menargetkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Alfian (2020), transisi ekonomi Tiongkok ke level global ditandai dengan penggunaan instrumen pembangunan internasional dan keuangan untuk memperluas pengaruh strategis dan menciptakan pola interdependensi baru, terutama di kawasan

Asia Tenggara. Oleh karena itu, keterlibatan Tiongkok dalam proyek seperti *Two Countries Twin Parks* perlu dipahami sebagai bagian dari strategi ekonomi-politik global yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan nasional Indonesia.

Kerja sama kedua negara semakin diperkuat melalui partisipasi Indonesia dalam inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI), proyek utama seperti KCIC, pembangunan pelabuhan, dan kawasan industri menjadi implementasi nyata kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) yang menjadi fokus penelitian ini. Pasca penandatanganan MoU TCTP pada 2021, kerja sama ekonomi antar kedua negara semakin erat. Tercatat sebanyak 21 proyek kerja sama dengan total nilai mencapai 6,36 miliar USD telah resmi disepakati oleh 40 entitas bisnis dari kedua negara. Beberapa di antaranya mencakup pengembangan *Tiongkok–Indonesia Cross-Border E-commerce Industrial Park*, hasil kerja sama antara *Fuzhou Banxi Technology Co., Ltd* dan *Sandratex*, serta proyek jaringan *5G Fixed Wireless Access* di Pulau Jawa yang melibatkan *Fujian Taikuk Technologies Investment Company Limited* bersama PT. Solusi Sinergi Digital Tbk (Kemenko Marves, 2023).

Tidak hanya itu, pasca TCTP dilakukan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang mencakup investasi dalam jumlah besar dengan proyeksi mencapai Rp60 triliun untuk pengadaan dan pengembangan lahan industri seluas 500 hektar. Investasi

ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna menarik sektor-sektor industri prioritas layaknya finansial serta perbankan, infrastruktur serta logistik, energi, industri otomotif, teknologi baterai, agrikultur, jaringan telekomunikasi, elektronik, serta maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk penerbangan (Kemenko, 2025).

Implementasi kerja sama TCTP juga melibatkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia melalui KEK Industropolis Batang beserta *Tiongkok State Construction Engineering Corporation* (CSCEC), yakni salah satu BUMN utama Tiongkok di bidang konstruksi dan pengembangan kawasan industri. Selain kawasan di Batang, proyek TCTP juga akan dikembangkan di Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang, serta di Bintan, menunjukkan skala kerja sama yang luas dan berorientasi jangka panjang (Kemenko, 2025).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia telah secara resmi menetapkan agenda lanjutan berupa pelaksanaan *Joint Committee* pada April 2025, sebagai mekanisme koordinasi untuk menjaga keberlangsungan proyek dan mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Dukungan diplomatik terhadap proyek ini juga diperkuat melalui hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto serta Presiden Xi Jinping pada November sebelumnya, yang menjadi latar belakang strategis dari kelanjutan kerja sama ini (Kemenko, 2025).

2.2.2 Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan

Indonesia juga telah memilih untuk memperkuat hubungan pertahanannya dengan Tiongkok. Ini dimulai dengan perjanjian kemitraan strategis pada tahun 2005, yang meletakkan dasar untuk kerja sama pertahanan. Pada tahun 2007, kedua negara telah membentuk Forum Konsultasi Bilateral untuk membahas masalah pertahanan (Waluyo & Risman, 2020).

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui aktivitas seperti pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta kunjungan resmi antar pejabat militer. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama ini adalah partisipasi perwira militer Indonesia dalam program pendidikan di lembaga pertahanan Tiongkok, termasuk di pusat pelatihan seperti *Chinese PLA Chinese Language Center*. Selain itu, pengiriman petugas Indonesia ke program pelatihan khusus, seperti yang diselenggarakan di Sesko TNI, turut mendukung pengembangan profesionalisme serta memperluas jaringan kerja sama militer-ke-militer yang konstruktif dan saling menguntungkan (Waluyo & Risman, 2020).

Kunjungan pejabat tinggi pertahanan, seperti kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok ke Indonesia pada Desember 2013, semakin mempertegas pentingnya diplomasi pertahanan dalam membangun kepercayaan strategis. Dalam kunjungan tersebut, Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) yang diterapkan

tidak dimaksudkan untuk mengubah status hukum wilayah udara negara lain, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah nasional (Waluyo & Risman, 2020).

Selain itu, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok juga diperkuat melalui kerja sama maritim dan angkatan laut. Bentuk kerja sama ini meliputi pelaksanaan patroli bersama serta dialog strategis terkait isu-isu keamanan laut. Inisiatif tersebut menjadi instrumen penting dalam pengelolaan serta perlindungan kawasan maritim, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki signifikansi strategis seperti Laut Tiongkok Selatan (Waluyo & Risman, 2020).

Babak Baru Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok karena kedua negara memperingati 75 tahun hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 13 April 1950. Peringatan ini tidak hanya menjadi simbol sejarah panjang kerja sama, tetapi juga menjadi pengingat akan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kemitraan di berbagai bidang, termasuk perdagangan, infrastruktur, energi, serta hubungan sosial budaya (Simanjuntak & Hasjanah, 2025).

Dalam momentum peringatan hubungan diplomatik yang telah menginjak tahun ke-75 antara Indonesia dengan Tiongkok, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Presiden RRT Xi Jinping saling berbalas pesan ucapan selamat serta penghargaan terhadap satu sama lain, yang merefleksikan eratnya jalinan persahabatan antara kedua negara. (Kementerian Luar Negeri, 2025).

Presiden Prabowo menekankan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok yang telah berlangsung selama 75 tahun merupakan bukti nyata dari kemitraan yang kokoh dan terus berkembang. Beliau juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerja sama dalam lima bidang utama: politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan. Kemudian, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara berkembang yang berperan penting di kawasan Global South, kemitraan Indonesia dan Tiongkok memiliki makna strategis serta pengaruh global yang luas. Indonesia tetap konsisten dalam upaya memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif (KSK) dengan Tiongkok. Hubungan yang semakin erat ini diharapkan membawa manfaat timbal balik serta mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional (Kementerian Luar Negeri, 2025).

Pada tanggal 21 April 2025, Beijing menjadi tuan rumah perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dari kedua negara, di antaranya adalah Wang Yi selaku Menteri Luar Negeri dari Tiongkok, beserta Dong Jun selaku Menteri Pertahanan Tiongkok, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin (*Ministry of Foreign Affairs Republic of Tiongkok, 2025*).

Dalam sambutannya, Wang Yi menekankan bahwa selama 75 tahun terakhir, hubungan antara Tiongkok dan Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Lebih dari tujuh dekade sudah hubungan antara kedua negara terjalin

dan semakin kokoh seiring dengan berjalannya waktu, diikuti dengan kerja sama yang telah menghasilkan banyak capaian nyata serta telah terbukti mampu melewati berbagai tantangan dalam dinamika hubungannya. Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan kepala negara, otonomi strategis, prinsip saling menguntungkan, dan keadilan serta keseimbangan sebagai fondasi hubungan bilateral. Wang Yi juga menyatakan kesiapan Tiongkok untuk bersama Indonesia mengembangkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan dan Semangat Bandung, serta memperkuat kerja sama kedua negara (*Ministry of Foreign Affairs Republic of Tiongkok, 2025*).

Tidak berhenti di situ, Wang Yi juga mengingatkan, tujuh dekade lalu, kedua negara berperan penting dalam suksesnya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kini, dengan terbentuknya mekanisme dialog strategis komprehensif serta pertemuan antara menteri luar negeri dengan menteri pertahanan dari kedua negara, maka hubungan Indonesia-Tiongkok telah memasuki babak baru. Tiongkok siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk menjadi pelopor kepercayaan serta kerja sama di tengah-tengah berbagai negara besar beserta negara tetangga, dan mendorong keterbukaan serta kemajuan bersama di *Global South* (*Ministry of Foreign Affairs Republic of Tiongkok, 2025*).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan kemitraan Indonesia-Tiongkok semakin kokoh seiring berjalannya waktu dan kerja sama praktis terus berkembang. Menurut penuturan beliau, Tiongkok kini menjadi mitra pembangunan yang dapat diandalkan bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat persatuan

dan siap bekerja sama dengan Tiongkok untuk meneruskan semangat Bandung serta membawa hubungan bilateral ke era kemakmuran bersama. Pernyataan tersebut tentu sesuai dengan salah satu prinsip utama yang dijadikan fondasi hubungan kedua negara, yaitu keuntungan bersama yang dimaknai sebagai komitmen kedua negara terhadap strategi pembangunan terbuka, upaya memperkuat kemitraan dalam kerangka *Belt and Road Initiative*, serta penolakan terhadap proteksionisme (Ministry of Foreign Affairs Republic of Tiongkok, 2025).

2.3 *Belt and Road Initiative*

Abad ke-21 secara luas dikenal sebagai masa kebangkitan Tiongkok, yang kerap disebut dengan istilah “*The Rise of Tiongkok*”. Tidak hanya itu, Tiongkok telah menunjukkan kemampuannya sebagai kekuatan regional utama (*regional power*) di Asia dan dinilai memiliki kapabilitas untuk menjadi hegemon global berikutnya setelah Amerika Serikat. Kapabilitas tersebut tergambar jelas dari kebijakan yang diinisiasikan Xi Jinping selaku Presiden RRT, yang berfokus pada implementasi program *Belt and Road Initiative* (BRI) (Putri & Ma’arif, 2019).

Pada 2013, Tiongkok memperkenalkan *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai strategi pembangunan global yang bertujuan memperkuat konektivitas dan kerja sama antarnegara di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa. Inisiatif ini terdiri dari dua jalur kunci, yakni *Silk Road Economic Belt* yang berfokus pada daratan, beserta *21st Century Maritime Silk Road* yang menitikberatkan pada

rute laut. Melalui BRI, Tiongkok berupaya membangun jaringan infrastruktur, memperlancar arus perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi bersama negara-negara mitra. Memegang predikat sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara dan terletak pada jalur strategis, Indonesia menjadi salah satu mitra utama dalam implementasi BRI, khususnya dalam pengembangan infrastruktur serta konektivitas maritim. Inisiatif ini berhasil mengkoneksikan lebih dari 65 negara, mencakup lebih dari 62% populasi global, 35% dari total perdagangan internasional, serta mewakili lebih dari 31% dari produk domestik bruto (PDB) dunia (Putri & Ma'arif, 2019).

Sebagai salah satu negara yang dianggap penting dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas oleh Tiongkok, Indonesia sudah ditawarkan untuk bergabung sejak awal program ini diluncurkan. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menduduki peringkat keempat secara global dan menjadi tempat bernaung bagi lebih dari 200 suku bangsa yang hidup berdampingan secara kondusif. Tidak hanya itu, predikat negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia disandang Indonesia, dengan masyarakat pluralistik yang menganut Islam moderat serta menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dengan latar belakang itu, Indonesia hadir sebagai salah satu negara demokrasi di dunia dengan populasi yang tergolong terbesar. Lebih jauh dari itu, stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga selama satu dekade terakhir memungkinkan para pemimpin di Indonesia untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam hubungan internasional serta politik global. Dengan latar belakang kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa keputusan Tiongkok

untuk mengajak Indonesia bergabung dalam inisiatif tersebut sangatlah masuk akal dan berdasar (Fitriani, 2018).

Belt and Road Initiative (BRI) menitikberatkan pada lima target utama. Pertama, koordinasi terkait kebijakan, yang mengajak berbagai negara guna bersinergi di tengah proses implementasi beragam proyek pembangunan bersama. Kedua, *cultural exchange*, di mana BRI berfungsi sebagai penghubung untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dan meningkatkan pemahaman budaya antar perusahaan di negara-negara *silk road*, guna menciptakan keefektifan dalam kerja sama internasional. Ketiga, integrasi dalam sektor keuangan, yang dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi di bidang moneter serta keuangan demi mengelola risiko keuangan secara kolektif. Keempat, perdagangan serta investasi, dengan harapan BRI dapat mempermudah dan meningkatkan kerja sama lintas batas dalam bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong ekonomi yang terintegrasi. Kelima, fasilitas yang serba terkoneksi, yang mana fokusnya adalah pada pembangunan serta peningkatan infrastruktur seperti moda transportasi, pelabuhan, jalan raya, serta sistem transmisi listrik guna memperluas jaringan konektivitas antarnegara (LehmanBrown International Accountants, 2018).

2.3.1 Hubungan Indonesia-Tiongkok di bawah Payung *Belt and Road Initiative*

Sebelum adanya proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP), pola hubungan Indonesia dengan Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) lebih didominasi oleh *dependensi* daripada *interdependensi*. Salah satu contohnya adalah proyek Kereta Cepat

Jakarta-Bandung (KCJB), di mana dalam implementasinya Indonesia sangat bergantung pada teknologi dan rekayasa dari perusahaan-perusahaan Tiongkok (Tempo, 2023). Ketergantungan tersebut semakin diperkuat oleh struktur perdagangan bilateral yang masih didominasi oleh ekspor komoditas mentah, seperti batu bara dan nikel, tanpa diiringi dengan optimalisasi nilai tambah di dalam negeri (BPS, 2024). Namun, skema TCTP menunjukkan pola yang berbeda. Dalam proyek ini, tidak hanya Indonesia yang bergantung pada teknologi Tiongkok, tetapi Tiongkok juga semakin membutuhkan Indonesia, khususnya dalam rantai pasok komoditas pertanian tropis seperti kelapa. Salah satu pilar utama TCTP adalah pembangunan Taman Industri Kelapa di *Yuanhong Investment Zone*, Fujian, yang secara khusus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Tiongkok akan produk olahan kelapa asal Indonesia. Di sisi lain, Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dirancang untuk menjadi salah satu kawasan industri strategis di Indonesia, dengan konsep pengembangan yang disebut-sebut sebagai “Shenzen versi Indonesia” (BKPM, 2024).

Sebelumnya, hubungan dagang Indonesia-Tiongkok memang masih didominasi oleh ekspor komoditas, tetapi perkembangan kerja sama TCTP justru memperlihatkan bahwa ketergantungan kini bersifat dua arah. Di sisi investasi, meskipun Tiongkok konsisten menjadi salah satu dari tiga besar sumber investasi asing langsung (FDI) di Indonesia, sebagian besar investasi tersebut masih terkonsentrasi pada proyek-

proyek yang nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati oleh industri nasional (BKPM, 2023). Pola hubungan seperti ini menunjukkan bahwa sebelum TCTP, kerja sama Indonesia-Tiongkok cenderung bersifat *dependensi struktural*, dengan Indonesia lebih banyak bergantung pada modal, teknologi, dan pasar dari Tiongkok. Salah satu contohnya adalah komoditas kelapa dan produk turunan tropis lainnya, di mana Tiongkok mulai bergantung pada suplai dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestiknya. Hal ini bahkan ditindaklanjuti secara konkret dengan pembangunan Taman Industri Kelapa sebagai bagian dari proyek TCTP, yang tidak hanya berfungsi sebagai basis produksi, tetapi juga sebagai simpul rantai pasok global yang menghubungkan sumber daya Indonesia dengan pasar Tiongkok (Maritim, 2024). Artinya, posisi Indonesia dalam kerja sama ini bukan lagi sekadar sebagai pemasok bahan mentah, melainkan telah naik tingkat menjadi bagian strategis dalam *integrated supply chain* kedua negara.

Setelah hadirnya TCTP, pola hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang cenderung lebih interdependen semakin terlihat melalui pembangunan kawasan industri terintegrasi, mendorong hilirisasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menyebut TCTP sebagai langkah konkret untuk memastikan agar kerja sama Indonesia-Tiongkok tidak lagi berhenti pada penyerapan investasi, melainkan juga mendorong transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja dalam skala

besar (Maritim, 2024). Dengan demikian, TCTP menjadi momentum penting untuk mengubah relasi ekonomi Indonesia-Tiongkok dari sekadar relasi bergantung menjadi hubungan timbal balik yang lebih setara.

Terlepas dari berbagai peluang yang ditawarkan, skeptisme terhadap *Belt and Road Initiative* masih menghantui. Di beberapa negara, inisiatif BRI dianggap berpotensi mengancam kedaulatan suatu negara, melemahkan kepemimpinan nasional, serta menghambat kemajuan ekonomi jangka panjang mereka (Yuniarto, 2020). Di Indonesia, investasi melalui BRI menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan, terutama karena opini publik yang menolak agresi komunis dan penyebaran agama yang digembar-gemborkan, serta migrasi tenaga kerja asal Tiongkok (P2SDR-LIPI, 2018).

Terdapat tiga isu krusial yang dapat memengaruhi kemajuan BRI di masa depan. Pertama, kurangnya pengetahuan kedua negara mengenai satu sama lain menjadi penyebab utama meningkatnya ketakutan yang tidak berdasar terkait Tiongkok dan BRI di Indonesia. Kedua, opini publik yang ada di Indonesia mengenai BRI sangat dipengaruhi oleh liputan harian yang ditampilkan oleh media lokal hingga nasional mengenai Tiongkok dan BRI. Kemudian ketiga, persepsi mengenai BRI di kalangan pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan di Indonesia secara signifikan lebih baik dibanding opini publik, sebagian besar karena pertukaran dan kerja sama yang terus menguat dengan Tiongkok (Yuniarto, 2020).

Sejak lama, tepatnya pada 1950 saat pembentukan hubungan diplomatik bilateral, Indonesia dan Tiongkok telah menjalin kerja sama budaya yang erat. Untuk mendorong keselarasan strategi pembangunan BRI, penting untuk mempromosikan pertukaran sosial dan budaya antara kedua negara dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif (Yuniarto, 2020).

Menyadari pentingnya pemahaman antar budaya (*intercultural understanding*) serta dampaknya terhadap proyek BRI seperti *Two Countries Twin Parks*, maka pada Agustus 2024 Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Kementerian Luar Negeri Indonesia, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan *Indonesia-Tiongkok Youth Exchange Program 2024* (ICYEP). Program ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda dari kedua negara di berbagai bidang keilmuan, menumbuhkan *mutual understanding* terkait keberagaman budaya, serta yang paling penting untuk disoroti adalah mempelajari serta melihat langsung hasil kerja sama Indonesia-Tiongkok. Kunjungan ke Kawasan Industri Terpadu Batang dan *Yuanhong Investment Zone* termasuk dalam agenda penting dari program ini untuk melihat kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam skema *Two Countries Twin Parks* (Maritim, 2024).

Kekhawatiran terhadap Tiongkok dengan proyek *Belt and Road Initiative* nya rupanya tidak hanya dirasakan masyarakat, namun juga para diplomat. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yeremia (2020), secara umum para diplomat Indonesia melihat Tiongkok sebagai suatu ancaman yang moderat, terutama karena kekhawatiran bahwa Indonesia bisa dieksploitasi secara ekonomi melalui keterlibatan dalam BRI. Namun, di sisi lain, mereka juga mengakui manfaat yang sangat potensial yang bisa diperoleh Indonesia dari inisiatif ini. Meskipun ada kecenderungan untuk memandang niat Tiongkok secara skeptis, mereka tetap memberikan penilaian positif terhadap BRI dan percaya bahwa Indonesia dapat mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut. Persepsi yang ada bersifat ambivalen, mengandung kekhawatiran sekaligus harapan yang besar, yang pada akhirnya akan membentuk dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok ke depan (Yeremia, 2020).

Narasi skeptisme terkait BRI selalu menggambarkan kekhawatiran bahwa Tiongkok sengaja menjebak negara-negara mitra dalam utang sehingga dapat mengambil alih aset strategis mereka ketika gagal membayar. Namun berbagai kajian dan analisis terbaru menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut seringkali dilebih-lebihkan dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan (Jones & Hameiri, 2020).

Misalnya, pada penelitian Jones dan Hameiri (2020), diungkapkan bahwa banyak proyek BRI yang bermasalah bukan karena

strategi jebakan utang yang disengaja oleh Tiongkok, melainkan akibat tata kelola yang buruk serta keputusan domestik dari negara penerima pinjaman. Dalam kasus Sri Lanka, proyek kontroversial tersebut lebih banyak dipicu oleh agenda domestik negara tersebut daripada oleh strategi Tiongkok secara langsung (Jones & Hameiri, 2020).

Selain itu, narasi skeptisisme terkait *debt trap diplomacy* dalam *Belt and Road Initiative* juga mendapat kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa BRI merupakan peluang besar bagi negara berkembang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi, asalkan mitigasi risiko dilakukan dengan tepat. Liu (2020) menekankan pentingnya transparansi dalam perjanjian pinjaman, pengelolaan fiskal yang hati-hati, dan kapasitas negosiasi yang kuat dari negara mitra sebagai kunci utama agar proyek BRI tidak berubah menjadi beban utang yang merugikan (East Asia Forum, 2023; Liu, 2020).

Kehadiran proyek seperti *Two Countries Twin Parks* (TCTP) membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penerima investasi pasif, melainkan mulai mengarahkan kerja sama agar mendukung industrialisasi dalam negeri. Meski demikian, sebelum adanya proyek strategis seperti TCTP, hubungan kedua negara cenderung menunjukkan pola dependensi, terutama dalam hal ketergantungan teknologi dan pembiayaan proyek infrastruktur.

Oleh karena itu, TCTP menjadi langkah konkret menuju interdependensi, di mana kedua negara saling membutuhkan dalam

penguatan rantai pasok dan kawasan industri bersama. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menegaskan bahwa melalui TCTP Indonesia berupaya meningkatkan nilai tambah ekspor industri dan mempercepat transfer teknologi agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan mentah (Maritim, 2024). Hal ini menjadi peluang untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi global, asalkan tetap diiringi dengan transparansi kebijakan dan peningkatan kapasitas industri nasional.

2.4 Proyek *Two Countries Twin Parks*

2.4.1 Latar Belakang Proyek *Two Countries Twin Parks*

Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui berbagai inisiatif strategis, salah satunya adalah proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP). Proyek ini menjadi salah satu pilar penting dalam mempererat hubungan ekonomi dan industri antara kedua negara, dengan fokus pada pengembangan kawasan industri terpadu yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

Proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) antara Indonesia dengan Tiongkok merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk mengkolaborasikan visi pembangunan utama kedua negara, yakni Poros Maritim Dunia milik Indonesia dengan *Belt and Road Initiative* milik

Tiongkok melalui pengembangan kawasan industri terpadu dan terintegrasi. Proyek TCTP meliputi pembangunan kawasan industri di beberapa lokasi penting di Indonesia, yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah, Kawasan Industri Aviarna di Semarang, Jawa Tengah, dan *Bintan Industrial Estate* di Riau yang kemudian terhubung dengan *Yuanhong Investment Zone* di Provinsi Fujian, Tiongkok. Melalui TCTP, kedua negara berupaya menggenjot investasi, memperkuat hubungan dagang kedua negara, serta mengakselerasi laju pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan penciptaan kesempatan kerja baru (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023).

Pakar hubungan internasional Wang Yiwei dari Renmin University menyatakan bahwa skema kerja sama ini merupakan pembagian pengalaman modernisasi Tiongkok kepada Indonesia, yang memungkinkan Indonesia untuk tidak perlu memulai pembangunan dari nol, melainkan melakukan lompatan dengan memanfaatkan pengalaman dan teknologi dari negara maju (Tiongkok Daily, 2023).

Lebih lanjut, disampaikan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2023), Menurut Menko Luhut, bidang-bidang prioritas yang menjadi fokus kerja sama dalam TCTP meliputi industri maritim, pengolahan pangan, material bangunan, elektronik, serta sejumlah sektor lain yang telah disepakati bersama. Sejak penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada 12 Januari 2021, Indonesia bersamaan dengan Tiongkok secara aktif

menggenjot masuknya investasi di kawasan industri yang sudah ditentukan, yaitu *Yuanhong Investment Zone* di Fujian, Tiongkok serta kawasan industri di Indonesia yang meliputi Batang, Bintan, dan Semarang (Mingyang, 2023).

Konsep kerja sama *Two Countries Twin Parks* menggambarkan kemitraan di mana Indonesia dan Tiongkok masing-masing mengembangkan kawasan industri di wilayahnya untuk menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Skema ini terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengoptimalkan infrastruktur serta kebijakan kedua negara. Kawasan pengembangan di wilayah Tiongkok adalah *Yuanhong Investment Zone*, Fuzhou yang diproyeksikan luasnya 61km persegi, sedangkan di Indonesia meliputi tiga lokasi yang strategis: Batang, Aviarna (Semarang), dan Bintan dengan total zona perencanaan mencapai 87,6 km persegi (Antara News, 2025).

Proyek *Two Countries Twin Parks* umumnya mencakup pengembangan kawasan industri yang didukung oleh infrastruktur yang mutakhir, pusat riset serta pengembangan (R&D), beserta akses yang mudah bagi korporasi yang berasal dari Indonesia dan juga Tiongkok. Proyek ini diupayakan mampu mendorong terciptanya peluang kerja baru, memperkuat kemampuan sektor industri dalam negeri, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan serta *transfer of knowledge* (Munawaroh, 2024).

Proyek *Two Countries Twin Parks* merupakan bagian penting dari kerja sama berkualitas tinggi antara Indonesia dengan Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (Mingyang, 2023). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turut menunjukkan keterlibatan aktif dalam mendukung implementasi proyek *Two Countries Twin Parks*. Hal tersebut terlihat dengan adanya catatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 yang menyebutkan terdapat agenda pendampingan bilateral antara Menko Marves RI dengan State Councilor/ Menlu RRT di Danau Toba, pada tanggal 12 Januari 2021.

Dalam pertemuan dengan Wang Yi selaku Menteri Luar Negeri Tiongkok pada Januari 2021 untuk mendiskusikan terkait implementasi proyek TCTP, Menko Luhut menyampaikan harapan bahwa pembangunan ini dapat menjadi contoh bagi kerja sama berikutnya antara Indonesia-Tiongkok. Investasi Tiongkok di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *4+1 Rule of Thumb* yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Prinsip tersebut meliputi aspek ramah lingkungan, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja yang melibatkan tenaga kerja lokal, peningkatan nilai tambah, serta penerapan model kemitraan *business to business* (Aldila, 2021).

Dalam forum Indonesia-Tiongkok *Two Countries Twin Parks* (TCTP) *Promotion Conference* yang berlangsung di sela-sela acara *The 22nd Tiongkok International Fair for Investment & Trade* (CIFIT) di Kota

Xiamen, Provinsi Fujian pada 8-11 September 2022, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok bersama dengan Guo Ningning, yakni Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Fujian menyepakati upaya bersama untuk mengkokohkan kemitraan melalui koridor *Two Countries Twin Parks* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok (Diplomasi Republika, 2022).

Ditegaskan oleh Guo Ningning, bahwa kemajuan hubungan antara Fujian dan Indonesia khususnya melalui proyek TCTP telah menjadi sorotan utama baik di tingkat pemerintah provinsi hingga nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penjelasan mengenai manfaat dan signifikansi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) sebagai landasan hukum bagi pelaku usaha yang ingin membangun kemitraan bisnis dengan Indonesia oleh Xu Yong Dong, yang merupakan ketua firma hukum asal Tiongkok yaitu TopWe dengan menerjemahkan UUCK ke dalam bahasa mandarin (Diplomasi Republika, 2022).

2.4.2 Perkembangan *Proyek Two Countries Twin Parks* Indonesia-Tiongkok

Proyek *Two Countries Twin Parks* turut menjadi agenda pembicaraan di berbagai forum penting, salah satunya pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang diselenggarakan di Bali pada November 2022. Pada kesempatan tersebut, Indonesia dan Tiongkok mengeluarkan *joint statement* atau pernyataan bersama yang menyoroti urgensi untuk terus melanjutkan dukungan dan mempromosikan

pengembangan proyek “*Two Countries, Twin Parks*”. Inisiatif ini diharapkan akan memberikan sumbangsih yang lebih signifikan dalam upaya pembangunan komunitas kedua negara, yang visinya selaras antara Indonesia dan Tiongkok (Warta Buana, 2025).

Di *Yuanhong Investment Zone*, telah dibentuk suatu *holding group* untuk mengelola proyek *Two Countries, Twin Parks*. Holding group tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi, badan manajemen, entitas penanam modal atau investasi, penyedia dana sektor industri, serta lembaga kajian strategis untuk mengakselerasi pengembangan kawasan dengan standar yang unggul (Warta Buana, 2025).

Sementara itu, pembangunan 15 proyek infrastruktur dengan nilai investasi sekitar 2,926 miliar yuan (dengan Rp2.092 per yuan) tengah dikerjakan dengan intensitas tinggi. *Yuanhong Investment Zone* juga mengimplementasikan 40 regulasi dan tindakan spesifik yang memerlukan dukungan dari level provinsi dan yang lebih tinggi, mencakup aspek kemudahan proses kepabeanan, penjamin aspek-aspek fundamental, keringanan fiskal dan perpajakan, serta fasilitas pengembangan industri, yang keseluruhannya masih dalam tahap proses perizinan (Warta Buana, 2025).

Inisiatif tersebut mengedepankan proses dialog yang ekstensif, peran serta yang saling menguntungkan, serta pembagian keuntungan yang merata, sambil menerapkan visi *Silk Road* untuk meningkatkan kolaborasi yang harmonis, transparansi, kebersamaan, pertukaran

pengetahuan (*exchange of knowledge*), dan kemakmuran bersama. Melalui perkembangan yang dinamis serta capaian yang konstruktif, proyek *Two Countries, Twin Parks* berhasil memperoleh dukungan yang luas serta keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak.

Pemerintah Provinsi Fujian diketahui juga terus meningkatkan upaya untuk menarik lebih banyak investasi asing. Sejak awal tahun 2023, sejumlah pejabat setempat telah melakukan berbagai kunjungan bisnis ke Indonesia dan berhasil memfasilitasi 19 proyek kerja sama bilateral dengan total nilai investasi mencapai 42,1 miliar yuan (Mingyang, 2023).

Djauhari Oratmangun selaku Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, menyampaikan bahwa Tiongkok beserta ASEAN telah membangun kemitraan strategis yang komprehensif, di mana kedua pihak kini menjadi mitra dagang terbesar bagi satu sama lain. Lebih dari itu, sebagai sebuah pola kerja sama yang telah berkembang secara dinamis selama beberapa tahun kebelakang, proyek *Two Countries Twin Parks* dianggap sebagai salah satu contoh keberhasilan *Belt and Road Initiative* (Mingyang, 2023).

Pengembangan kawasan ini mengalami percepatan sejak awal tahun 2023. Pada bulan Januari, Tiongkok memberikan persetujuan pada tingkat Dewan Negara untuk pembentukan kawasan percontohan inovasi, serta pengembangan ekonomi dan perdagangan sebagai kolaborasi dengan Indonesia. Selanjutnya, sekitar satu bulan kemudian, diselenggarakan Forum Promosi Investasi antara Indonesia dengan

Fuzhou (Tiongkok), serta Seremonial Penandatanganan Proyek di Jakarta, yang menghasilkan kesepakatan untuk 15 proyek senilai total 21,6 miliar yuan (Wartabuana, 2023).

Memasuki kuartal kedua, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2023, Jakarta kembali menjadi tuan rumah *Two Countries Twin Parks” Economic and Trade Cooperation Promotion Conference*. Konferensi ini berhasil melahirkan 21 kesepakatan proyek dengan nilai kontrak mencapai 43,2 miliar yuan atau setara dengan US\$ 6,36 miliar. Proyek-proyek tersebut melibatkan 40 pelaku usaha, termasuk kerja sama Tiongkok-Indonesia *Cross-Border E-commerce Industrial Park* antara Fuzhou Banxi Technology Co., Ltd dan Sandratex, serta proyek jaringan 5G *Fixed-Wireless-Access* di Jawa yang dijalin antara Fujian Taikuk *Technologies Investment Company Ltd.* dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Kesempatan tersebut merupakan salah satu agenda penting yang merupakan hasil sinergi yang baik antara *High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism* (HDCM) RI-RRT dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok. Paralel dengan konferensi tersebut, di Kota Fuqing digelar pameran kerja sama ekonomi dan pertukaran perdagangan yang menghasilkan penandatanganan 10 proyek strategis bernilai total 4,55 miliar yuan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2023).

Proyek *Two Countries Twin Parks* yang menjadi bagian penting dari *Belt and Road Initiative* antara Indonesia dan Tiongkok terus

menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperkuat kerja sama bilateral serta menarik minat investasi dari berbagai pihak. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pemerintah Provinsi Fujian pada Juli 2023, baru-baru ini sejumlah proyek baru mulai dijalankan di kawasan industri kedua negara (GoFujian, 2023).

Di kawasan industri Indonesia, beberapa proyek tengah dipersiapkan, antara lain pembangunan jalur produksi untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan energi baru dan terbarukan. Selain itu, dikembangkan pula basis perikanan kedua sebagai bagian dari pusat perikanan laut global hasil kerja sama Indonesia-Tiongkok yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2024 (GoFujian, 2023).

Sementara itu, di *Yuanhong Investment Zone*, perusahaan Wayne Saneheld (Fujian) Investment Co Ltd, hasil kerja sama antara Saneheld Food dari Fujian dan Salim Group dari Indonesia saat ini sedang menjalani proses pendaftaran untuk kegiatan industri dan perdagangan. Kota Fuzhou juga menerapkan berbagai inovasi untuk menarik lebih banyak investor ke kawasan industri di Tiongkok, termasuk penyusunan peta investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara aktif (GoFujian, 2023).

Bertepatan dengan peringatan 10 tahun *Belt and Road Initiative* pada tahun 2023, kemajuan signifikan pada proyek *Two Countries Twin Parks* memberikan makna tersendiri dalam pengokohan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dengan Tiongkok. Terdapat

capaian yang berarti bersamaan dengan momentum peringatan satu dekade inisiatif tersebut. Dimulai saat Januari 2023, Dewan Negara Tiongkok menyetujui pembentukan Zona Demonstrasi Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Perdagangan Tiongkok-Indonesia. Kemudian pada Februari, 15 proyek dengan total investasi mencapai 21,6 miliar yuan ditandatangani dalam acara pertemuan bisnis di Jakarta. Selanjutnya pada Mei, konferensi promosi investasi menghasilkan penandatanganan 21 proyek dengan nilai investasi yang terbilang besar, yaitu 43,2 miliar yuan (GoFujian, 2023b).

Meskipun masih terus dikembangkan, dampak positif dari adanya inisiatif *Two Countries Twin Parks* sudah mulai terlihat bahkan sejak awal. Banyak perusahaan yang merasa dimudahkan dengan adanya skema TCTP ini. Sebut saja salah satu contohnya perusahaan asal Tiongkok, yaitu *JD Yuanhong Food Digital Economy Industry Center* yang berlokasi di *Yuanhong Investment Zone*, Fuzhou. Perusahaan tersebut tidak menyangka bahwa produk makanan dari pusat sudah dikirim ke Indonesia dengan waktu yang begitu cepat, bahkan tidak lama setelah perusahaan tersebut berdiri. Secara tidak langsung, perusahaan tersebut menjadi suatu contoh wujud nyata dari pendalaman kerja sama perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok (Mingyang, 2023).

Menurut Xu Liping, Direktur Pusat Studi Asia Tenggara di *The Chinese Academy of Social Sciences*, proyek *Two Countries Twin Parks* merupakan bagian penting dari kerja sama berkualitas tinggi antara

Indonesia dengan Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative*. Mengingat Indonesia beserta Tiongkok mengalami perkembangan yang pesat dalam kerja sama di bidang perdagangan hingga investasi selama dekade terakhir. Xu juga menambahkan bahwa dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan, Indonesia dan Tiongkok memiliki keunggulan masing-masing (Mingyang, 2023).

Selain memudahkan Tiongkok untuk melakukan ekspor ke Indonesia, hadirnya *Two Countries Twin Parks* juga membantu memudahkan Tiongkok untuk mengimpor bahan baku dari Indonesia. Hal ini membuka peluang kolaborasi yang lebih luas karena Indonesia serta negara-negara ASEAN lain memiliki sumber daya alam yang cocok untuk produk perikanan dan iklim yang baik untuk buah-buahan tropis, sehingga membuka peluang yang besar bagi pengolahan makanan di *Yuanhong Investment Zone*. Kolaborasi ini memungkinkan produk perikanan dari Indonesia bisa diekspor dalam jumlah yang besar ke Tiongkok (Mingyang, 2023).

Sampai bulan Mei 2023, komite pengelola telah menyetujui setidaknya 143 proyek infrastruktur dengan nilai total sebesar 64,83 miliar yuan guna memperkuat jalan, telekomunikasi, serta fasilitas di kawasan, agar tercipta lingkungan bisnis yang lebih baik. Tidak hanya itu, pada 19 Mei 2023, tercatat 10 kontrak perdagangan senilai 4,55 miliar yuan telah ditandatangani dalam forum kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok yang diadakan di Fuqing, Provinsi Fujian. Hal tersebut

mencakup perdagangan luar negeri, peningkatan *supply chain*, dan pengolahan makanan (Mingyang, 2023).

Tercatat pada pertengahan 2023, di *Yuanhong Investment Zone*, pembangunan kluster industri makanan dengan nilai output yang diperkirakan mencapai 100 miliar yuan sedang berjalan. Salah satu proyek utama adalah pembangunan *Yuanhong International Food Exhibition dan Trading Center* yang tengah dalam tahap konstruksi. Setelah selesai, diharapkan *Trading Center* tersebut dapat menjadi basis pergudangan rantai dingin terbesar di Tiongkok. (GoFujian, 2023b)

Pemerintah Provinsi Fujian melalui laman resminya memperkirakan bahwa ke depan, proyek *Two Countries Twin Parks* akan mengembangkan 42 proyek industri dengan total investasi sebesar 56,85 miliar yuan. Hal ini dipercaya akan semakin memperkuat kerja sama industri lintas batas serta mendorong perkembangan ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia (GoFujian, 2023b).

Dengan proyek *Two Countries Twin Parks* yang sejauh ini berjalan dengan lancar dan dianggap berhasil, Wakil Presiden Indonesia ke-13, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa perluasan kerja sama *Two Countries Twin Parks* akan mencakup sektor industri halal. Pasar produk halal, baik di tingkat global maupun di pasar kedua negara dianggap memiliki potensi yang besar dan dapat digunakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi. Keseriusan Pemerintah Indonesia terlihat dari adanya komitmen untuk memperkuat koordinasi internal dengan membentuk

kelompok kerja antar lembaga *Two Countries Twin Parks* guna mempermudah fasilitas investasi bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal tersebut dilakukan demi mendukung kelancaran kerja sama ini (Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia, 2023).

Indonesia melakukan koordinasi dengan Provinsi Fujian dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan melalui sejumlah inisiatif, seperti penghapusan hambatan perdagangan, peluncuran program Indonesia National Pavilion, dan kerja sama standar halal (*Halal Standard Cooperation*).

Dalam kerangka kerja sama ekonomi bilateral, Tiongkok menempati posisi sebagai rekan dagang terbesar sekaligus berperan menjadi salah satu investor kunci bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, total nilai perdagangan antara kedua negara pada tahun 2021 mencapai US\$123,4 miliar, mengalami peningkatan sebesar 58,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juli 2022, nilai perdagangan bilateral tersebut mencapai US\$ 82,2 miliar, naik sebesar 29,1% (Diplomasi Republika, 2022).

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, terdapat peningkatan volume perdagangan secara signifikan dari US\$ 78,37 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$147,79 pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 74%. Dari total tersebut, ekspor Indonesia mencapai US\$71,09 miliar, sementara impor sebesar US\$76,69. Perdagangan dengan Tiongkok tetap mendominasi, dengan volume tertinggi dibandingkan dengan Amerika

Serikat yang besarnya US\$39 miliar serta Uni Eropa sebesar US\$25 miliar (Aulia, 2025).

Untuk realisasi investasi, pada tahun 2024 Tiongkok menanamkan modal sebesar US\$8,1 miliar di Indonesia, menempatkannya pada posisi ketiga sebagai investor terbesar. Sejak tahun 2016, Tiongkok konsisten berada di jajaran tiga besar investor asing di Indonesia. Dalam dekade terakhir, investasi dari Tiongkok meningkat drastis dari US\$630 juta pada tahun 2015 menjadi US\$9,1 miliar pada 2024 (Aulia, 2025)

Analisis dari Tiongkok berharap bahwa seiring semakin banyak proyek kolaborasi Indonesia dengan Tiongkok yang terjalin, operasi bisnis yang sukses mulai muncul dan dapat diperluas ke negara-negara ASEAN lainnya. (Mingyang, 2023). Sekitar bulan April 2025, Indonesia baru saja mengirimkan pengiriman perdana kelapa segar seberat 200 kg yang mendarat di Bandara Fuzhou, Tiongkok. Komoditi ini kemudian akan segera didistribusikan ke para produsen di fasilitas pengolahan dalam koridor kerja sama *Two Countries Twin Parks* (Antara News, 2025).

Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar global dengan kapasitas pengolahan produk turunan yang signifikan, Indonesia menemukan pasar yang sangat potensial di Tiongkok, di mana konsumen memiliki preferensi yang tinggi terhadap kelapa segar. Melihat komplementaritas antara permintaan dan penawaran (*supply and demand*) ini, *Yuanhong Investment Zone* telah mengembangkantaman industri kelapa lintas

negara dengan empat lini produksi yang telah beroperasi. Kelancaran pasokan kelapa ini sekaligus menjadi kunci dalam pengembangan rantai industri hulu-hilir yang baru, dan mengakselerasi penguatan hubungan ekonomi serta perdagangan kedua negara (Antara News, 2025).

Meskipun terpisahkan jarak geografis, kemitraan kedua negara telah berkembang melampaui proyek tunggal menjadi kolaborasi multi-sektor. Inisiatif *Two Countries Twin Parks* mengkapitalisasi keunggulan komparatif masing-masing pihak dengan fokus pada lima sektor prioritas yakni perikanan kelautan, pertanian tropis, industri ringan serta tekstil, mesin beserta elektronik, serta pertambangan berkelanjutan. Model kerja sama ini menggali pola pembagian kerja internasional yang mengintegrasikan rantai industri, rantai pasok, dan rantai nilai secara efektif. Hingga saat ini, setidaknya lebih dari 70 proyek antara Indonesia dengan Tiongkok telah diimplementasikan dengan nilai investasi kumulatif melampaui 93 miliar yuan (Antara News, 2025).

Selain mempertimbangkan faktor keunggulan komparatif, pemilihan wilayah sebagai lokasi proyek *Two Countries, Twin Parks* antara Indonesia dan Tiongkok juga ditentukan oleh berbagai kriteria strategis lainnya yang bersifat struktural, teknis, dan institusional. Kriteria-kriteria ini menjadi fondasi penting agar proyek kerja sama industri lintas negara tersebut dapat berjalan secara efisien, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi kedua negara.

Pertama, seluruh kawasan yang terlibat memiliki posisi geografis yang strategis dan terkoneksi langsung dengan pelabuhan internasional atau bandar udara utama. *Yuanhong Investment Zone*, misalnya, terletak di Distrik Mawei, Kota Fuzhou, yang merupakan titik penting dalam Jalur Sutra Maritim dan memiliki akses langsung ke Pelabuhan Mawei dan Bandara Internasional *Fuzhou Changle*. Di Indonesia, Kawasan Industri Terpadu Batang berada di jalur tol Trans-Jawa dan hanya berjarak sekitar satu jam dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kawasan Industri Bintan memiliki konektivitas langsung ke Singapura melalui terminal feri internasional serta Pelabuhan Tanjung Pinang. Sementara itu, Kawasan Aviarna di Semarang berada sangat dekat dengan Bandara Internasional Ahmad Yani dan pusat logistik Jawa Tengah. Kesamaan ini menunjukkan bahwa keterhubungan fisik yang kuat ke pasar internasional menjadi standar dalam pemilihan lokasi TCTP, karena efisiensi logistik sangat krusial dalam proyek yang menargetkan integrasi rantai pasok lintas negara (Cheng, et al., 2022).

Kedua, seluruh lokasi TCTP memiliki status kelembagaan yang jelas dan telah ditetapkan sebagai kawasan industri strategis dalam rencana pembangunan nasional atau daerah. *Yuanhong Investment Zone*, misalnya, merupakan proyek unggulan di bawah inisiatif *Belt and Road* Tiongkok dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi Fujian. Kawasan Industri Batang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia dan dikembangkan langsung oleh konsorsium

BUMN, dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Kawasan Bintan terdaftar dalam skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mendapat insentif fiskal serta kemudahan perizinan. Aviarna sendiri merupakan kawasan industri swasta yang telah mendapat dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa status kelembagaan yang kuat dan dukungan pemerintah lintas level menjadi syarat penting dalam kelayakan suatu wilayah untuk terlibat dalam kerja sama TCTP (Munawaroh, 2024).

Ketiga, seluruh kawasan memiliki kesiapan infrastruktur atau paling tidak mendapat jaminan percepatan pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Yuanhong telah memiliki lebih dari 190 perusahaan aktif dan dilengkapi dengan jaringan jalan internal, pusat logistik, serta proyek pengembangan kawasan pameran dan perdagangan hasil laut terbesar di Tiongkok Timur. Di sisi Indonesia, Batang memiliki lahan seluas 4.300 hektare yang sudah siap dibangun dan dilengkapi dengan fasilitas utilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan akses jalan. Bintan memiliki pelabuhan niaga dan kawasan industri yang telah terbangun, serta terus dikembangkan untuk mendukung sektor perikanan dan logistik. Aviarna, meskipun relatif baru, sudah memiliki fasilitas dasar dan terkoneksi dengan pusat manufaktur Semarang (Yean & Negara, 2020). Kesamaan ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur, baik yang sudah ada maupun yang dijanjikan secara konkret oleh pemerintah, merupakan syarat utama dalam menarik investor lintas negara dalam kerangka TCTP.

Keempat, keempat kawasan menunjukkan adanya dukungan aktif dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk fasilitasi perizinan, penyediaan lahan, dan insentif investasi. Di Yuanhong, pemerintah kota dan provinsi secara langsung memfasilitasi pengembangan proyek melalui kebijakan fiskal dan penyederhanaan prosedur bisnis. Batang menunjukkan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BUMN, dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun masterplan kawasan serta menggaet investor Tiongkok. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan turut berperan dalam menata regulasi dan perizinan lintas sektor untuk kawasan industri perikanan di Bintan. Aviarna juga difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang, yang aktif mendukung perluasan kawasan dan pengembangan sektor industri manufaktur berteknologi tinggi. Artinya, komitmen politik dan kapasitas institusional pemerintah daerah menjadi salah satu syarat penting yang menjamin kelancaran operasional dan investasi dalam kerangka TCTP.

Pada tanggal 20 Maret 2025, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis (KEK) Batang dengan Tiongkok *State Construction Engineering Corporation* (CSCEC), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RRT, menandai tonggak penting dalam implementasi TCTP di Indonesia. MoU ini merupakan komitmen awal untuk investasi dan pengembangan lebih lanjut Kawasan

Industri Terpadu Batang (KIT Batang) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Kumparan Bisnis, 2025).

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa pengembangan lahan seluas 500 hektare di KEK Industropolis Batang menjadi tahap awal kerja sama dalam skema ini. Investasi yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp60 triliun diharapkan dapat menjadi katalisator bagi percepatan industrialisasi, khususnya di sektor hilirisasi dan industri padat karya. Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan investasi dari Tiongkok, tetapi juga membuka peluang kerja yang besar. Setiap hektare lahan industri diprediksi mampu menciptakan serta membuka setidaknya 50 hingga 60 lapangan pekerjaan, secara keseluruhan proyek ini dinilai mampu membuka lebih dari 10.000 kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia (Kumparan Bisnis, 2025).

Pengembangan kawasan ini merupakan hasil nyata dari pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden RRT Xi Jinping pada November 2024. Proyek ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur dan teknologi tinggi serta memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional. CSEC akan berperan aktif sebagai mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di kawasan tersebut dengan membawa pengalaman dan teknologi konstruksi dari Tiongkok. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri nasional,

meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor manufaktur. Tidak hanya itu, penandatanganan MoU ini juga menandai komitmen KEK Batang dan CSCEC untuk bekerja sama dalam merancang, membangun, dan mempromosikan kawasan, serta mendorong percepatan pengambilalihan tenant strategis dalam *global supply chain* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus memantau serta mengkoordinasikan pelaksanaan proyek ini untuk memastikan investasi berjalan sesuai rencana dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dapat tercapai. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan diadakan Komite Bersama (*Joint Committee*) pada April 2025 guna membahas kebijakan serta langkah strategis dalam memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Perlu diingat bahwa selain kawasan Batang, *Two Countries Twin Parks* juga diterapkan di dua lokasi lain, yaitu Kawasan Industri Wijayakusuma di Semarang serta Kawasan Industri Bintan. Ketiga kawasan ini diharapkan dapat saling melengkapi dan membentuk ekosistem industri yang terintegrasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

Tahun ini, bertepatan dengan peringatan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok yang ke-75 tahun. Fuzhou, kota pesisir yang

berkembang berkat potensi maritimnya, berkomitmen memanfaatkan peluang yang tercipta melalui *Two Countries Twin Parks* untuk memperdalam keterbukaan ekonomi tingkat tinggi serta memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan *Belt and Road Initiative* di masa depan (Antara News, 2025). Menurut penuturan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, sampai saat ini tercatat setidaknya sebanyak 20.000 proyek dari perusahaan Tiongkok telah dibangun di Indonesia (Kumparan Bisnis, 2025).